

EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN *BIMKER* PASTAR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BLITARRegina Ibrahim¹¹Politeknik Ilmu PemasarakatanEmail: reginaibrahim944@gmail.com

Abstrak: Salah satu tujuan dilakukannya pembinaan yaitu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana kembali atau residivis. Kenyataan yang terjadi adalah masih banyak mantan narapidana yang masih melakukan kejahatan kembali sehingga dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian perlu dilakukan evaluasi guna mengetahui permasalahan yang terjadi sehingga dapat diperbaiki. Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai evaluasi program pembinaan kemandirian yang diselenggarakan di Bimker Lapas Blitar atau yang biasa disebut dengan Bimker Pastar. Desain penelitian ini adalah penelitian evaluatif (*evaluation research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara langsung dengan sejumlah informan dan observasi. Penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan kemandirian di Lapas Blitar telah berjalan cukup baik. Pada evaluasi input, rekrutmen narapidana dilakukan sesuai kebutuhan mereka, petugas pembinaan memiliki kompetensi yang memadai, dan program ini bekerja sama dengan pihak ketiga untuk kelancaran pelaksanaan. Evaluasi proses menunjukkan bahwa standar operasional dan kebijakan dijalankan dengan baik, dan pelayanan sesuai harapan narapidana. Evaluasi hasil menunjukkan adanya peningkatan keterampilan dan produktivitas narapidana. Namun, Lapas tidak menjamin keberlanjutan hasil di luar, karena adanya stigma sosial dan keterbatasan modal yang dimiliki mantan narapidana, sehingga dibutuhkan tindak lanjut untuk mendukung kemandirian mereka di masyarakat

Kata Kunci: Evaluasi Program, Pembinaan Kemandirian, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar.

Abstract: One of the objectives of coaching is to prevent repeat criminal acts or recidivism. The reality is that there are still many former prisoners who still commit crimes again, so that in the implementation of independent coaching, an evaluation needs to be carried out to find out the problems that occur so that they can be fixed. In general, this study discusses the evaluation of the independent coaching program held at Bimker Blitar Prison or commonly called Bimker Pastar. The design of this study is evaluative research (*evaluation research*) which uses a qualitative approach involving direct interviews with a number of informants and observations. The study shows that the independent coaching program at Blitar Prison has been running quite well. In the input evaluation, recruitment of prisoners is carried out according to their needs, the coaching officers have adequate competence, and this program collaborates with third parties for smooth implementation. The process evaluation shows that operational standards and policies are implemented well, and services are in accordance with prisoners' expectations. The evaluation of the results shows an increase in the skills and

productivity of prisoners. However, the prison does not guarantee the sustainability of the results outside, due to the social stigma and limited capital owned by former prisoners, so follow-up is needed to support their independence in society.

Keywords: *Program Evaluation, Independence Development, Class IIB Blitar Penitentiary.*

PENDAHULUAN

Guna mencapai tujuan Pemasyarakatan dalam membentuk para Warga Binaan supaya mereka menjadi pribadi yang lebih baik, sadar akan kesalahannya, meningkatkan diri, menghindari perilaku kriminal, dan mampu hidup secara bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakat, serta aktif berpartisipasi pada pembangunan, maka setiap narapidana memiliki kewajiban untuk menjalani program pembinaan selama mereka menjalani masa pidananya dalam Lapas. Pembinaan tersebut merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas narapidana dari segi kepribadian dan kemandirian warga binaan. Pada dasarnya pembinaan bukanlah satu-satunya metode terbaik untuk mengubah kualitas seseorang namun salah satu cara yang paling efektif (Anjani & Wibowo, 2023). Hal itu menjadi penting bagi narapidana untuk mengikuti program pembinaan guna mewujudkan tujuan pemasyarakatan. Melalui program pembinaan khususnya pembinaan kemandirian diharapkan para narapidana dapat meningkatkan diri menjadi individu yang lebih baik dan mencegah mereka dari residivis.

Realitanya, pembinaan narapidana di Indonesia berjalan belum optimal sehingga kurang memberikan dampak yang menjadi tujuan dilakukannya pembinaan. Hal tersebut dapat dilihat masih banyak terdapat mantan narapidana yang menjadi residivis sesudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan baik dalam kejahatan yang sama atau lainnya sehingga membuat mereka masuk kembali di Lembaga Pemasyarakatan. Kecenderungan sukses atau tidaknya program pembinaan dapat dilihat dari kecil atau besarnya angka residivis yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan tersebut (Utoyo, 2015).

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa, pada bulan Februari 2020 terekap sebanyak 18,12% dari 268.001 tahanan dan narapidana adalah residivis. Kemudian untuk narapidana sendiri, sebanyak 20,01% dari 204.185 narapidana merupakan residivis. Kasus residivis yang sampai saat ini terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa pemberian pembinaan atau intervensi pada narapidana belum berjalan dengan maksimal sehingga tujuan pemasyarakatan belum tercapai. Data tersebut memperlihatkan realita bahwa masih tingginya kasus residivis di Indonesia. Maka dari itu perlu dilakukannya evaluasi guna mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana pada Lapas sehingga upaya perbaikan dalam

pelaksanaannya dapat dilaksanakan. Salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada di Jawa Timur yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar. Lapas tersebut merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bertanggung jawab dalam bidang pemasyarakatan dan berada di bawah lingkup Direktorat Jenderal Pemasyarakatan naungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur. Lapas Kelas IIB Blitar memiliki program pembinaan baik kepribadian ataupun kemandirian. Dalam pembinaan kemandirian terdapat program Bimbingan Kerja Lapas Blitar yang dikenal sebagai Bimker Pastar. Terdapat banyak kegiatan kerja yang diselenggarakan di Lapas Blitar antara lain *barbershop*, pertukangan, percetakan, produksi tempe, produksi sambel pecel, produksi kerupuk puli, *handycraft*, perikanan, perkebunan, dan lain-lain.

Data jumlah penghuni keseluruhan Lapas Blitar terdapat 475 orang, terkhusus pada narapidana terdapat 362 orang dengan 109 narapidana yang terqualifikasi sebagai narapidana residivis dengan mayoritas jenis pidana adalah narkoba dan pencurian. Hal itu menunjukkan 30% narapidana yang menghuni Lapas Blitar merupakan narapidana residivis atau pengulangan tindak pidana. Pemberian pembinaan kemandirian bagi narapidana merupakan aksi nyata terkait upaya yang direalisasikan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk meminimalisir tingkat narapidana residivis. Upaya tersebut telah dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar sebagai sarana untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas narapidana sehingga menekan angka residivis, hal itu selaras dengan apa yang menjadi sasaran dan tujuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan.

Namun jika dilihat kenyataannya, tingkat residivis pada Lapas Blitar masih menunjukkan persentase yang tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan pada narapidana belum terlaksana sesuai dengan tujuannya. Melihat permasalahan yang terjadi maka perlu dilakukan sebuah kegiatan evaluasi mengenai kegiatan pembinaan kemandirian yang terlaksana pada Bimker Pastar pada Lapas Kelas IIB Blitar. Dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu menilai sejauh mana pelaksanaan program dari kebijakan yang mengaturnya dapat dijalankan, serta mengetahui apa yang menjadi kekurangan dari pelaksanaan tersebut sehingga hasil penelitian ini dapat menghasilkan suatu solusi yang nantinya dapat dijalankan oleh Lapas agar dapat mencapai tujuan dari pembinaan dalam sistem pemasyarakatan.

Menurut Pietrzak, dkk. alasan perlu dilakukannya kegiatan evaluasi program adalah sebagai berikut: Pertama, kegiatan evaluasi akan menghasilkan identifikasi hambatan dan

kekuatan dari program, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hal itu dapat menjadi dasar perbaikan program; Kedua, dengan adanya evaluasi maka efektivitas dan efisiensi dari program dapat terukur. Kemudian menurutnya evaluasi memiliki empat tujuan, yaitu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan program, hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar untuk memodifikasi dan meningkatkan penyelenggaraan program, dan menilai seberapa jauh suatu program melaksanakan undang-undang, peraturan, dan amanat atau harapan yang telah dibuat, serta menemukan atau menguji teori umum dalam melakukan pengembangan pengetahuan.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah penelitian evaluatif (*evaluation research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan jenis penelitian yang dikenal sebagai penelitian kualitatif deskriptif, diartikan sebagai jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atau menjawab pertanyaan pada perumusan masalah. Penelitian ini menjelaskan bahwa peneliti melakukan pencarian fakta terkait permasalahan yang akan diteliti berupa proses pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian pada Bimker Pastar di Lapas Kelas IIB Blitar. Informasi tersebut diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Data dan informasi yang telah terkumpul kemudian dilakukan pemeriksaan keabsahan data dengan metode triangulasi yang kemudian hasilnya dianalisa menggunakan metode *Interactive Model* yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman (1992). Model interaktif pada analisa data memiliki 3 (tiga) langkah yang dijalankan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan atau verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pembinaan kemandirian melalui kegiatan kerja merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk memberi bekal/*skill* pada Warga Binaan dalam melakukan pekerjaan agar nantinya dapat dimanfaatkan ketika kembali kemasyarakat sehingga mereka dapat memperbaiki kehidupannya. Melihat masih banyaknya permasalahan yang masih terjadi yaitu residivis atau pengulangan tindak pidana kembali mengartikan bahwa selama narapidana berada dalam Lapas, mereka tidak mendapat efek jera atau kurangnya pembinaan yang dilakukan (Nisailkamilah, 2020). Melalui kegiatan kerja tersebut Lapas memanfaatkannya sebagai salah satu fasilitas yang dapat digunakan oleh narapidana untuk memperbaiki dirinya.

Hal tersebut diharapkan narapidana dapat menjadi lebih baik, tidak mengulangi kesalahan, dan dapat hidup mandiri ketika berada di lingkungan masyarakat.

Evaluasi input pada program pembinaan kemandirian Bimker Pastar ini akan membahas 3 unsur yang termasuk kedalam evaluasi input program tersebut. Hal itu diantaranya adalah narapidana, petugas, dan program. Pelaksanaan suatu program tentunya memiliki sasaran tersendiri supaya tujuan program yang telah ditetapkan dapat dicapai. **Narapidana** dalam lapas memiliki latar belakang tindak pidana yang berbeda-beda sehingga diperlukan proses asesmen untuk menentukan kebutuhan pembinaannya (Ahmad Pajri & Nelwitis, 2024). Program pembinaan tersebut pastinya harus relevan dengan kebutuhan narapidana maka dari itu secara formal terdapat petugas Bapas yang melakukan asesmen kebutuhan pada narapidana sehingga muncul rekomendasi yang tepat untuk narapidana tersebut, seperti misalnya apakah narapidana tersebut diharuskan mengikuti pembinaan kemandirian atau kepribadian. Namun terkadang dalam praktik di lapangan asesmen tersebut dilakukan langsung oleh petugas lapas sendiri yang melakukan asesmen pada narapidana.

Petugas sebagai pelaksana pembinaan kemandirian di Lapas merupakan sumber daya manusia yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam menjalankan suatu program dalam organisasi agar tujuan dan target dari program yang dijalankan tercapai (Qotrunada & Rahayu, 2023). Oleh sebab itu Lapas dalam menjalankan programnya harus memilih petugas yang memiliki kompetensi dan kualitas yang sesuai dengan program yang dijalankan sehingga kinerja terbaiknya dapat mendorong organisasi mencapai tujuannya. Kualifikasi petugas bimker memang tidak tersedia namun sebagai petugas pemasyarakatan mereka dituntut untuk mampu dalam membina narapidana khususnya dalam melakukan pelatihan pada program ini. Dalam pelaksanaannya petugas Bimker pada Lapas Blitar selalu meningkatkan kompetensinya dengan selalu ikut serta pada pelatihan berlangsung selain itu mereka juga memiliki pemahaman yang baik terkait pekerjaannya dan memiliki wawasan yang cukup banyak dalam melaksanakan tugasnya.

Program pembinaan kemandirian akan berjalan dengan optimal ketika adanya campur tangan pihak ketiga yang dirasa mampu dan memiliki kompetensi pada bidangnya. Lapas Blitar dalam menjalankan pembinaan kemandiriannya menggandeng pihak ketiga yang terdiri dari organisasi pemerintah ataupun non pemerintah yang memiliki kompetensi pada masing-masing bidang yang ada di bimker. Kedua belah pihak akan saling melengkapi kekurangan dengan melaksanakan tugas fungsinya. Sinergitas antara lapas dan pihak ketiga yang baik akan

meningkatkan kualitas narapidana yang memiliki kompetensi pada bidang terkait dengan cara memberi keterampilan kerja serta peningkatan hasil produksi agar nantinya dapat hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat sehingga tidak mengulangi tindakannya (Sunia et al., 2022).

Evaluasi proses pada proses suatu program bertujuan untuk menilai sejauh mana program telah dijalankan. Pada program pembinaan kemandirian pada bimker pastar ini akan dilihat juga bagaimana interaksi langsung pada narapidana sebagai sasaran dan petugas sebagai pelaksana program. **Standar Praktik Terbaik** atau yang biasa disebut dengan SOP merupakan peraturan yang digunakan untuk mengarahkan dan sebagai acuan berjalannya suatu program dengan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Standar Operasional Prosedur atau SOP ini merupakan acuan yang dipakai oleh Lapas Blitar untuk menjalankan suatu program atau pelayanan pada narapidana. Dalam pelaksanaannya Lapas blitar telah mengikuti SOP yang ada ketika akan melaksanakan program.

Kebijakan dalam hal ini adalah mengenai aturan dalam memilih warga binaan dan sumber daya manusia yang merupakan pelaksana dari program pembinaan kemandirian di Lapas. Sesuai dengan PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur bahwa narapidana yang telah menjalani 1/3 masa hukuman dapat mengikuti pembinaan di Lapas. Berdasarkan hasil wawancara dengan kasubsi giatja, peraturan tersebut telah dijalankan oleh Lapas Blitar dalam memilih narapidana yang dapat mengikuti pembinaan kemandirian. Kemudian dalam penentuan bidang apa yang akan diikuti oleh tiap-tiap narapidana yaitu dengan melakukan asesmen pada mereka agar diketahui minat dan bakatnya dalam bidang apa. Petugas yang bertanggung jawab menjalankan kegiatan kemandirian untuk narapidana ini berasal dari berbagai macam bidang pendidikan. Dari data yang didapatkan terdapat pegawai yang berasal dari lulusan Akademi Pemasyarakatan/Akip yang sekarang adalah Politeknik Ilmu Pemasyarakatan/Poltekip, dan juga terdapat lulusan dari universitas lain serta terdapat lulusan SMA/ sederajat. Semua lulusan tersebut pasti akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pusat untuk melatih kemampuan dari semua petugas sesuai bidangnya masing-masing.

Tujuan sendiri merupakan suatu harapan yang dapat dicapai dalam suatu organisasi atau lembaga. Tujuan dalam hal ini akan membahas mengenai tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar terkait diselenggarakannya pembinaan kemandirian ini. dapat disimpulkan bahwa tujuan dari dilakukannya pembinaan kemandirian melalui kegiatan kerja

ini memiliki dua tujuan yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek sendiri adalah untuk memberikan pelatihan pada narapidana sehingga mereka dapat menjalani masa pidananya dengan produktif dan menghasilkan barang-barang yang bernilai. Tujuan jangka panjang dalam hal ini adalah memberikan bekal untuk narapidana agar nantinya dapat dimanfaatkan di lingkungan masyarakat sehingga menjadi manusia yang lebih mandiri dan tyang terpenting tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Menurut Kotler 2007, **kepuasan klien** merupakan tingkat kepuasan yang dirasakan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang diperoleh dengan harapannya (Setiawan et al., 2019). Hal tersebut dilihat dari tiga aspek yaitu ketanggapan petugas, bukti fisik atau sarana dan prasarana, dan kepedulian petugas terhadap narapidana. Dalam hal ketanggapan (*responsiveness*) yang dimaksud adalah bagaimana petugas memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap dalam memberikan pembinaan kemandirian pada narapidana. Petugas dirasa sudah cukup tanggap dalam memberikan pelayanan pada narapidana pada pelaksanaan program kemandirian seperti dengan memberikan respon atas hal-hal yang menjadi keluhan dari narapidana. Fasilitas seperti sarana dan prasarana juga mempengaruhi kepuasan narapidana selain itu juga ketersediannya dapat membantu mengoptimalkan berjalannya kegiatan kemandirian narapidana di Lapas. Bukti fisik dalam hal ini adalah berupa fasilitas yang didapatkan dan dirasakan langsung oleh naapidana selama mengikuti pembinaan kemandirian di Lapas. Berdasarkan hasil yang didapat mengenai sarana prasarana di Lapas Blitar memiliki kekurangan dalam hal luas ruangan yang membuat narapidana merasa sempit pada saat melakukan kegiatan di dalam satu ruangan pada saat bersamaan. Aspek lain dalam kepuasan narapidana adalah empati yang merupakan kepedulian petugas dalam menjalin hubungan dengan narapidana, memberi dukungan, serta peka dan tahu akan kebutuhan narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian. Petugas telah menganggap mereka sebagai teman yang peduli dengan mereka, kepedulian itu seperti misalnya memberikan nasehat dan semangat pada narapidana pada saat menjalani pidananya di Lapas, selain itu narapidana juga sering berbagi cerita atau mengeluh kepada petugas, hal tersebut menunjukkan bahwa kedekatan antara petugas dengan narapidana terjalin dengan baik.

Evaluasi hasil mengarah pada *overall impact* dari pelaksanaan program yang diberikan pada narapidana sebagai penerima sehingga hal itu memunculkan pertanyaan yaitu kapan program pembinaan tersebut dapat dikatakan telah berhasil mencapai tujuannya dan

Bagaimana narapidana sebagai penerima manfaat dapat mengalami perbedaan setelah dilakukannya program tersebut. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan orientasinya pada program yaitu dinilai dari berkembangnya hasil produksi yang dilakukan oleh narapidana dan orientasi pada penerima, keberhasilan dalam hal ini dilihat berdasarkan pada perubahan perilaku dari narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian. Perubahan perilaku tersebut dilihat dari munculnya sikap mandiri, produktif, dan lain sebagainya. Narapidana yang telah mengikuti kegiatan kerja ini merasa lebih produktif dan memiliki keahlian baru dalam melakukan suatu pekerjaan, selain itu mereka juga dapat memanfaatkan waktu pidana mereka dengan hal yang positif. Namun jika di sandingkan dengan tujuan dari pembinaan kemandirian sendiri jika hanya membuat mereka menjadi lebih terampil dan produktif di dalam Lapas belum tentu dapat menjanjikan mereka untuk dapat hidup mandiri di luar. Hambatan mereka dalam mengembangkan keterampilan mereka ketika diluar adalah belum adanya modal, selain itu mereka juga akan terdiskriminasi dengan status mereka sebagai mantan narapidana sehingga akan sulit mendapatkan pekerjaan dimana narapidana ini memiliki rencana untuk mengumpulkan modal dari pekerjaan tersebut.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutu pelayanan program pembinaan kemandirian di Lapas Blitar pada evaluasi *input* pada dimensi penerima program yaitu narapidana telah dilaksanakan *recruitment* agar pemberian intervensi sesuai dengan kebutuhan narapidana, staff atau petugas yang bertanggung jawab dalam bimker juga telah memiliki kompetensi dan kulaitas yang baik dan terus ditingkatkan, program dilaksanakan dengan menggandeng pihak ketiga agar program dapat berjalan dengan lancar. Evaluasi proses bagian dimensi *standard best practice* berjalan berdasarkan SOP yang berlaku, kebijakan lembaga berjalan sesuai dengan ketentuan, tujuan jangka panjang dan jangka pendek telah dilaksanakan dan diterapkan, dari segi kepuasan klien didapatkan bahwa kualitas pelayanan telah terpenuhi sesuai dengan harapan narapidana. Pada evaluasi hasil yang dilihat berdasarkan sejauh mana program tersebut memberi perubahan yang positif untuk narapidana didapatkan bahwa narapidana lebih terampil dan produktif sehingga mereka merasa memiliki keterampilan baru serta aktivitas yang dapat dilakukan selama menjalani masa pidana di Lapas. Namun Lapas tidak menjamin hasil yang diperoleh oleh narapidana tersebut dapat dilanjutkan di luar Lapas, hal itu dikarenakan adanya stigma di masyarakat yang mengakibatkan mantan narapidana kesulitan

mendapat kerja selain itu juga karena faktor modal materi yang belum dimiliki mantan narapidana sehingga perlunya tindak lanjut untuk mempertahankan hasil yang telah dicapai di dalam Lapas dapat berlanjut sampai mantan narapidana menjadi manusia yang mandiri

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Pajri, & Nelwitis. (2024). Pelaksanaan Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto. *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(1), 42–50. <https://doi.org/10.25077/delicti.v.2.i.1.p.42-50.2024>
- Anjani, R. M., & Wibowo, P. (2023). Mengatasi Lingkaran Residivisme: Pemberdayaan Narapidana Melalui Pembinaan Kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 01(05), 50–60. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/296>
- Nisaikamilah, A. (2020). *Evaluasi Proses Program Pembinaan Kemandirian Giatja Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan.
- Qotrunada, M. F., & Rahayu, M. (2023). Kompetensi Petugas Pemasyarakatan dalam Pembinaan Kemandirian Narapidana Bidang Pertanian di Lapas Terbuka Kelas II B Kendal. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 12(2), 208–215. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i02.19727>
- Setiawan, A., Qomariah, N., & Hermawan, H. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen. *Jurnal Sains Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 9(2), 114–126.
- Sunia, U., Edison, E., & Kurnianingsih, F. (2022). Model Kemitraan dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 1(2), 92–102. <https://doi.org/10.24036/publicness.v1i2.27>
- Utoyo, M. (2015). Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level. *Jurnal Pranata Hukum*, 10(1), 37–48.